

Informasi bulanan

Juni 2023

solvetax

Lösungen für deine Steuern

**Konsultasi pajak SolveTax
StB Dipl.-Bw (FH) Sascha Schneider**

Schwindstraße 2
63739 Aschaffenburg

Telepon: +49 151 28960404

E-mail: mail@solvetax.de
www.solvetax.de

Selamat siang,

Apakah sebuah hunian "digunakan untuk tujuan hunian sendiri" sering kali menjadi pertanyaan utama dalam proses pajak. Baru-baru ini, Pengadilan Fiskal Düsseldorf mengomentari pertanyaan tentang pengenaan pajak atas transaksi penjualan pribadi, khususnya tentang keputusan kapan sebuah hunian digunakan untuk tujuan hunian sendiri.

Jika pasangan yang bercerai menjual bagian kepemilikan bersama di rumah keluarga tunggal kepada mantan pasangannya sebagai bagian dari pembagian properti pada saat perceraian, dapatkah penjualan tersebut dikenakan pajak sebagai transaksi penjualan pribadi? Pertanyaan ini harus diputuskan oleh Pengadilan Fiskal Federal.

Selain itu, Pengadilan Fiskal Federal memutuskan bahwa pengurangan pajak penghasilan sebesar 20% dari biaya untuk sistem panggilan darurat di rumah tidak dapat diklaim jika sistem tersebut hanya menjalin kontak ke pusat layanan 24 jam jika terjadi keadaan darurat.

Ada banyak hal yang terjadi dalam hukum acara! Bagian kedua dari Undang-Undang Implementasi DAC 7 bertujuan untuk memodernisasi dan mempercepat perubahan dalam hukum acara perpajakan, yaitu pemeriksaan pajak.

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau tentang topik lainnya? Silakan hubungi kami. Kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda.

Pajak penghasilan

Perpajakan atas penjualan tempat tinggal: perbedaan dalam kasus "penggunaan untuk tujuan hunian sendiri"

Dalam kasus "penggunaan untuk keperluan tempat tinggal sendiri" sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, perbedaan harus dibuat antara anak-anak yang harus diperhitungkan untuk tujuan pajak penghasilan dan pihak ketiga, mungkin juga orang yang berhak atas nafkah. Ini adalah keputusan Pengadilan Fiskal Düsseldorf.

Aset dikecualikan dari pajak sebagai transaksi penjualan pribadi jika digunakan secara eksklusif untuk tujuan hunian wajib pajak sendiri dalam periode antara akuisisi atau penyelesaian dan penjualan. Jika wajib pajak tidak menyerahkan tempat tinggal secara eksklusif kepada seorang anak (atau beberapa anak) untuk diperhitungkan untuk tujuan pajak penghasilan untuk digunakan secara gratis, tetapi pada saat yang sama kepada pihak ketiga, tidak ada penggunaan istimewa oleh wajib pajak untuk tujuan tempat tinggalnya sendiri.

Sebuah tempat tinggal yang disediakan secara gratis oleh wajib pajak untuk tujuan pemeliharaan tidak lagi (secara tidak langsung) digunakan untuk "tujuan tempat tinggal wajib pajak sendiri" jika properti tersebut diserahkan kepada kerabat lain - yang mungkin juga berhak atas pemeliharaan berdasarkan ketentuan hukum perdata - selain anak yang akan diperhitungkan untuk tujuan pajak penghasilan. Dengan latar belakang ini, penggunaan (bersama) oleh anak lain yang tidak (atau tidak lagi) diperhitungkan untuk tujuan pajak penghasilan karena usianya juga mengarah pada fakta bahwa flat secara keseluruhan tidak lagi dianggap digunakan untuk tujuan hunian wajib pajak sendiri. Oleh karena itu, pendapatan lain dari transaksi penjualan pribadi sudah selayaknya diperhitungkan karena penjualan kondominium.

Bunga dari diskonto harga pembelian yang dibayarkan secara angsuran sebagai pendapatan dari aset modal

Pengadilan Fiskal Cologne memutuskan bahwa bagian bunga yang termasuk dalam cicilan harga pembelian merupakan pendapatan dari aset modal. Pendapatan dari aset modal termasuk pendapatan dari klaim modal lainnya dalam bentuk apa pun jika pelunasan aset modal atau imbalan atas pengalihan aset modal untuk digunakan telah dijanjikan atau diberikan. Hal ini berlaku tanpa memperhatikan peruntukan dan struktur

hukum perdata dari penyertaan modal tersebut.

Jika sebuah objek yang termasuk dalam aset pribadi dijual dan klaim harga pembelian ditanggguhkan dalam jangka panjang - lebih dari satu tahun - hingga titik waktu tertentu, pembayaran yang dilakukan (cicilan harga pembelian) harus dibagi menjadi pelunasan dan bagian bunga. Bagian bunga akan dikenakan pajak penghasilan sebagai pendapatan dari klaim modal lainnya. Hal ini juga berlaku jika pihak-pihak yang berkontrak tidak menyepakati adanya bunga atau bahkan secara tegas mengecualikannya. Mengizinkan pembayaran cicilan jangka panjang untuk melunasi utang merupakan pemberian kredit oleh kreditur. Perjanjian klausul perlindungan nilai tidak mengubah hal ini, karena pembagian total harga pembelian sebagai jumlah pembayaran angsuran ke dalam harga pembelian sebagai pertimbangan dan bunga sebagai imbalan atas penggunaan modal tidak tergantung pada kehendak para pihak yang berkontrak. Dasarnya ditemukan dalam § 12 (3) dari Undang-Undang Penilaian, yang menyatakan bahwa klaim tanpa bunga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan jatuh tempo pada waktu tertentu harus didiskontokan, yaitu dibagi menjadi bagian modal dan bagian bunga. Ketentuan ini tidak dapat dikesampingkan. Dalam hal ini, hukum pajak berbeda dengan hukum perdata.

Tidak ada gugatan dari pihak ketiga dalam hal pemberitahuan penilaian atas akun kontribusi pajak

Pemegang saham perusahaan tidak berhak untuk menentang pemberitahuan yang dikeluarkan terhadap perusahaan mengenai penentuan saldo rekening kontribusi pajak yang terpisah. Ini adalah keputusan Pengadilan Fiskal Federal.

Korporasi, sebagai penerima pemberitahuan penilaian, berhak untuk mengajukan tindakan, terlepas dari dampak pemberitahuan yang terutama terkait dengan pemegang saham. Dampak faktual substantif dari pemberitahuan penilaian bagi pemegang saham korporasi tidak menimbulkan hak untuk mengajukan banding kepada pihak ketiga. Selain itu, Pasal 19.4 Undang-Undang Dasar tidak mengharuskan pemegang saham diberikan hak banding pihak ketiga. Meskipun hubungan antara perusahaan dan pemegang sahamnya diatur oleh apa yang disebut prinsip pemisahan, ini tidak berarti bahwa kedua tingkat tersebut "tidak terkait" satu sama lain. Sebaliknya, perusahaan dan pemegang saham terikat satu sama lain oleh perjanjian perusahaan dan pemegang saham dapat menggunakan kekuatan yang dihasilkan (misalnya hak

informasi) untuk menyebabkan perusahaan mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan penilaian yang diduga melanggar hukum.

Tidak ada pengurangan pajak untuk pengeluaran untuk sistem panggilan darurat rumah tanpa bantuan segera

Penggugat telah melengkapi apartemennya dengan sistem panggilan darurat rumah. Namun, kontrak yang disepakati dengan penyedia layanan hanya mencakup penyediaan perangkat panggilan darurat rumah dan layanan panggilan 24 jam. Kantor pajak tidak menganggap biaya yang diklaim untuk sistem panggilan darurat rumah sebagai layanan yang berhubungan dengan rumah tangga. Namun, pengadilan pajak menguatkan klaim tersebut.

Pengadilan Fiskal Federal memutuskan bahwa keputusan kantor pajak adalah sah. Pengurangan pajak menurut pasal 35a Undang-Undang Pajak Penghasilan hanya dapat diklaim untuk layanan yang berhubungan dengan rumah tangga yang disediakan di rumah tangga wajib pajak. Persyaratan yang terakhir tidak ada di sini, karena penggugat pada dasarnya membayar untuk layanan panggilan yang disiapkan oleh penyedia sistem panggilan darurat rumah serta untuk penerimaan panggilan darurat yang mungkin terjadi. Tugas panggilan dan penerimaan panggilan darurat yang masuk di pusat layanan serta, jika perlu, pemberitahuan kepada pihak ketiga sehingga mereka dapat memberikan bantuan di tempat, terjadi di luar rumah penggugat dan dengan demikian tidak di dalam rumah tangganya.

Catatan

Keputusan tersebut berbeda dengan keputusan Pengadilan Fiskal Federal mengenai biaya untuk sistem panggilan darurat di kediaman warga lanjut usia. Di sana, panggilan darurat dilakukan secara langsung ke perawat melalui pager, yang kemudian juga mengambil alih bantuan darurat yang diperlukan di lokasi.

Penentuan sisa kerugian yang dapat diperhitungkan untuk transaksi forward

Menurut Pengadilan Fiskal Federal, dalam kasus transaksi forward sebagai transaksi lindung nilai, asumsi korelasi hasil yang berlawanan mensyaratkan bahwa transaksi forward setidaknya melindungi sebagian risiko yang dihasilkan dari transaksi yang mendasarinya.

Korelasi yang berlawanan antara hasil transaksi yang mendasari dan transaksi lindung nilai tidak diberikan jika risiko suku bunga variabel pinjaman tidak hanya digantikan oleh risiko lain (mata uang) sebagai hasil dari perjanjian swap mata uang suku bunga, tetapi juga transaksi yang mendasari asli sebenarnya dibebani dengan risiko yang serupa dengan pinjaman mata uang asing dan dengan demikian terkena risiko tambahan. Dalam kasus kerugian dari transaksi forward dari partisipasi dalam suatu kemitraan, penentuan sisa kerugian yang dapat diteruskan tidak dilakukan pada tingkat kemitraan, tetapi pada tingkat mitra yang berpartisipasi dalam penilaian pajak penghasilan mereka.

Penjualan saham kepemilikan bersama di rumah keluarga tunggal pada saat perceraian dikenakan pajak sebagai transaksi penjualan pribadi

Jika pasangan yang bercerai menjual bagian kepemilikan bersama di rumah keluarga tunggal kepada mantan pasangannya sebagai bagian dari penyelesaian properti pada saat perceraian, penjualan tersebut dapat dikenakan pajak sebagai transaksi penjualan pribadi. Ini adalah keputusan Pengadilan Fiskal Federal.

Menurut Pengadilan Fiskal Federal, transaksi penjualan pribadi kena pajak terjadi jika sebuah properti diperoleh dan dijual kembali dalam waktu 10 tahun. Hal ini juga berlaku untuk setengah bagian kepemilikan bersama yang dijual oleh salah satu pemilik bersama kepada pemilik lainnya dalam proses pembagian properti setelah perceraian. Memang benar bahwa penjualan properti tidak akan dikenakan pajak jika properti tersebut digunakan untuk tujuan hunian sendiri selama periode antara akuisisi dan penjualan atau pada tahun penjualan dan dua tahun sebelumnya. Namun, pasangan yang sedang dalam proses perceraian tidak lagi menggunakan properti real estat yang dimiliki bersama untuk keperluan tempat tinggalnya sendiri jika dia telah pindah dan hanya pasangannya yang bercerai dan anak bersama yang terus tinggal di sana. Dalam kasus ini, tidak ada keadaan yang menghalangi adanya transaksi penjualan pribadi, seperti dalam kasus pengambilalihan atau lelang wajib. Memang benar bahwa istri yang bercerai telah menempatkan mantan pasangannya di bawah tekanan yang cukup besar. Namun, pada akhirnya, mantan pasangan tersebut secara sukarela menjual baginya di rumah keluarga tunggal kepada istrinya yang bercerai.

Pajak perdagangan

Tempat yang disewakan sebagai aset tetap fiktif - Hanya "produk" dari perdagangan yang menentukan batasan

Pengadilan Fiskal Berlin-Brandenburg mengomentari penambahan setengah pajak atas remunerasi untuk penyewaan akomodasi karyawan dan atas pertimbangan distribusi keuntungan yang tersembunyi.

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap meskipun hanya disewa atau disewakan dalam jangka waktu yang pendek; hal ini berlaku meskipun hubungan sewa atau penyewaan hanya berlangsung dalam hitungan hari atau jam.

Berdasarkan tujuan bisnis, hanya "produk" bisnis yang dapat memberikan kriteria demarkasi yang menentukan untuk menentukan apakah bangunan yang disewa adalah aset tetap fiktif atau aset lancar. Bangunan yang disewa untuk akomodasi karyawan adalah aset tetap fiktif jika keberadaan bangunan tersebut mutlak diperlukan untuk dapat menjalankan bisnis sama sekali.

Dalam hal ini, aspek lain diputuskan: Ketika menilai pengeluaran untuk perayaan atau untuk hiburan para tamu berdasarkan undang-undang perpajakan, kesempatan acara yang bersangkutan sangat menentukan. Pengeluaran GmbH untuk penyelenggaraan pesta pada hari ulang tahun pemegang saham mayoritas dan direktur utamanya merupakan distribusi laba yang disembunyikan jika perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa acara tersebut diselenggarakan untuk tujuan bisnis.

Lainnya

Tidak ada pengurangan kerugian bentuk usaha tetap asing "final"

Pengadilan Fiskal Federal telah membuat keputusan penting bagi perusahaan Jerman yang aktif secara internasional. Menurut keputusan ini, perusahaan domestik tidak dapat mengimbangi kerugian dari cabang yang berlokasi di negara Uni Eropa lain terhadap laba yang diperoleh di Jerman untuk mengurangi pajak jika, sesuai dengan perjanjian yang relevan untuk penghindaran pajak berganda, tidak ada hak perpajakan Jerman atas penghasilan luar negeri tersebut. Menurut para hakim, hal ini juga berlaku jika kerugian di luar negeri tidak dapat digunakan dalam keadaan apa pun untuk tujuan perpajakan dan dengan

demikian bersifat "final" (disebut kerugian final).

Dalam kasus yang dimaksud, sebuah bank yang berbasis di Jerman telah membuka cabang di Inggris pada tahun 2004. Namun, setelah cabang tersebut secara konsisten hanya menghasilkan kerugian, cabang tersebut ditutup kembali pada tahun 2007. Karena cabang tersebut tidak pernah menghasilkan keuntungan, bank tidak dapat menggunakan kerugian yang terjadi di Inggris untuk keperluan pajak di sana.

Pengadilan Fiskal Federal memutuskan bahwa kerugian tersebut juga tidak dapat digunakan di Jerman, karena menurut perjanjian yang relevan tentang penghindaran pajak berganda, pendapatan bentuk usaha tetap dari Inggris tidak dikenakan pajak Jerman. Faktor yang menentukan di sini adalah "tesis simetri", yang menyatakan bahwa pembebasan pajak atas pendapatan asing berdasarkan hukum perjanjian mencakup pendapatan positif dan negatif, yaitu kerugian. Seperti yang diputuskan oleh para hakim lebih lanjut setelah merujuk masalah ini ke Pengadilan Kehakiman Uni Eropa, pengecualian pengurangan kerugian ini tidak melanggar hukum Uni Eropa, bahkan sehubungan dengan apa yang disebut kerugian akhir.

Dewan Federal menyetujui undang-undang smart meter

Pada sesi 12.05.2023, Bundesrat menyetujui undang-undang yang disahkan oleh Bundestag untuk meluncurkan kembali digi-



talisasi transisi energi. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah pemasangan meteran listrik cerdas yang tidak birokratis dan lebih cepat - yang disebut meteran cerdas - dan dengan demikian perluasan "jaringan pintar". Perangkat ini dimaksudkan untuk membantu penggunaan energi secara efisien dan hemat biaya serta meringankan jaringan listrik.

Bundesrat (Majelis Tinggi Parlemen) telah membahas RUU asli Pemerintah Federal dalam sidang pleno pada tanggal 03.03.2023 dan mengomentarnya secara ekstensif. Bundestag menanggapi beberapa kritik Bundesrat dalam resolusi legislatifnya. Selain perubahan formal yang ekstensif, juga terdapat perbaikan terkait pemasangan smart meter di gedung-gedung multi-keluarga.

Undang-undang tersebut sekarang akan diteruskan kepada Presiden Federal untuk ditandatangani melalui

Pemerintah Federal. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Federal. Tanggal pastinya ditentukan oleh pemerintah federal, yang menyelenggarakan pemberlakuannya.

Undang-Undang Implementasi DAC7 "Modernisasi Pemeriksaan Pajak"

Tujuan dari Undang-Undang Implementasi DAC7 adalah, antara lain, untuk memperpendek waktu yang terkadang lama antara dimulainya dan selesainya audit eksternal, yaitu untuk mempercepat dan memperlancar kinerja audit pajak. Yang dimaksud Namun, percepatan yang dimaksud sering kali dicapai dengan memperketat wajib pajak.

Dengan demikian, kewajiban untuk bekerja sama akan semakin diperketat. Catatan kemudian harus diserahkan (berlaku untuk pertama kalinya untuk pajak dan pengembalian pajak yang timbul setelah tanggal 31 Desember 2024) dalam jangka waktu 30 hari setelah permintaan atau setelah pemberitahuan perintah audit.

Aspek lain yang memberatkan adalah kewajiban untuk memperhitungkan temuan audit dalam SPT lain dan memperbaikinya jika ada perubahan dalam dasar pengenaan pajak. Hasilnya adalah pergeseran tugas lebih lanjut dari administrasi pajak ke wajib pajak.

Di masa depan, otoritas pajak akan dapat meminta dokumen akuntansi dengan pemberitahuan perintah audit, yang harus diserahkan dalam jangka waktu yang wajar, jika perlu sebelum dimulainya audit eksternal. Berdasarkan dokumen yang diserahkan, fokus audit dapat ditentukan untuk audit eksternal. Jika dokumen telah diserahkan, wajib pajak harus diberitahu tentang titik fokus audit eksternal yang dimaksud. Namun, penamaan titik fokus audit bukan merupakan pembatasan audit eksternal terhadap fakta-fakta tertentu. Perintah pemeriksaan harus diterbitkan pada akhir tahun kalender setelah tahun kalender di mana surat ketetapan pajak mulai berlaku. Pemberitahuan selanjutnya tidak akan menunda dimulainya batas waktu penangguhan kedaluwarsa.

Sebuah instrumen yang benar-benar baru diperkenalkan dengan permintaan kerja sama yang memenuhi syarat. Hal ini memungkinkan auditor eksternal untuk memutuskan atas kebijakannya sendiri untuk meminta wajib pajak untuk bekerja sama secara tertulis atau secara elektronik setelah berakhirnya enam bulan sejak pemberitahuan perintah audit. Jika wajib pajak tidak atau kurang memenuhi kewajibannya untuk bekerja sama, maka akan dikenakan denda. Denda

keterlambatan kerja sama ini berjumlah 75 euro untuk setiap hari kalender penuh keterlambatan kerja sama dan dapat dikenakan untuk maksimum 150 hari kalender (maks. 11.250 euro). Selain penundaan kerja sama, biaya tambahan dapat dikenakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Biaya tambahan berjumlah maksimum 25.000 euro untuk setiap hari kalender penuh penundaan kerja sama dan dapat ditetapkan untuk maksimum 150 hari kalender.

Perbaikan juga telah dilakukan dalam konteks akses data elektronik. Di masa depan, otoritas pajak dapat meminta agar data ditransfer kepada mereka dalam format yang dapat dianalisis oleh mesin. Selain itu, ditetapkan bahwa penyimpanan data ini juga diperbolehkan pada sistem pemrosesan data seluler, misalnya pada laptop auditor.

Diharapkan juga bahwa peraturan baru tentang penangguhan masa berlaku ini akan mempercepat audit eksternal. Batas waktu baru diperkenalkan untuk tujuan ini. Penangguhan kedaluwarsa berakhir paling lambat lima tahun setelah akhir tahun kalender saat perintah audit diumumkan.

Hukum perdata

WEG: Tidak ada hak untuk menyetujui pemasangan tata surya di balkon

Pemilik kondominium tidak berhak untuk menyetujui pembangunan pembangkit listrik di balkon. Tidak masalah apakah kesan visual secara keseluruhan terganggu oleh ukuran konstruksi. Ini adalah keputusan Pengadilan Distrik Constance.

Penyewa sebuah apartemen memasang tata surya mini di bagian luar balkonnnya atas persetujuan pemilik apartemen. Modulnya berwarna hitam, berukuran 168 cm x 100 cm dan terhubung ke inverter. Pada pertemuan pemilik, sebuah resolusi disahkan oleh mayoritas untuk mencopot pembangkit listrik balkon tersebut. Kedua pemilik kondominium mengajukan keluhan terhadap hal ini.

Pengadilan menolak pengaduan tersebut. Pemilik flat tidak berhak atas persetujuan pembangkit listrik tenaga surya mini. Pemilik flat lainnya tidak harus menyetujui pembangunan pembangkit listrik di balkon. § Pasal 20 (1) WEG berisi larangan konstruksi untuk perubahan struktural tanpa persetujuan pemilik. Pemasangan sistem fotovoltaik merupakan perubahan semacam itu, tanpa ada gangguan pada substansi yang relevan. Juga tidak relevan apakah kesan visual keseluruhan dari kompleks perumahan terganggu

oleh ukuran struktural. Bagaimanapun, inilah yang terjadi di sini. Sistem surya mini sangat terlihat. Ada gangguan yang relevan dan tidak signifikan. Pertimbangan kebijakan hukum, betapapun meyakinkannya, tidak cukup.

Tanggal Pajak/Jaminan Sosial

Juni/Juli 2023

Jenis pajak		Kedewasaan	
Pajak upah, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		12.06.2023 ¹	10.07.2023 ²
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		12.06.2023	tidak berlaku
Pajak perusahaan, biaya tambahan solidaritas		12.06.2023	tidak berlaku
Pajak pertambahan nilai		12.06.2023 ³	10.07.2023 ⁴
Akhir masa tenggang untuk jenis pajak di atas pada saat pembayaran oleh:	Transfer bank ⁵	15.06.2023	13.07.2023
	Cek ⁶	12.06.2023	10.07.2023
Jaminan sosial ⁷		28.06.2023	27.07.2023
Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas		Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas harus dibayarkan kepada kantor pajak yang berwenang pada saat yang sama dengan pembagian keuntungan kepada pemegang saham.	

- Selama sebulan terakhir.
- Untuk bulan terakhir, untuk pembayar triwulanan selama triwulan kalender terakhir.
- Selama satu bulan terakhir, dalam kasus perpanjangan permanen untuk bulan kedua dari belakang.
- Untuk bulan terakhir, untuk bulan kedua dari belakang dalam hal perpanjangan permanen, untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan tanpa perpanjangan permanen.
- Biasanya, pengembalian PPN di muka dan pengembalian pajak upah harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya tambahan keterlambatan pembayaran yang akan dikenakan untuk keterlambatan pembayaran hingga tiga hari. Transfer harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga tanggal nilai pada rekening kantor pajak sama dengan tanggal jatuh tempo.
- Jika pembayaran dilakukan dengan cek, harap diperhatikan bahwa pembayaran tidak dianggap telah dilakukan hingga tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Sebagai gantinya, Anda harus menerbitkan surat perintah pendebitan langsung.
- Juran jaminan sosial secara seragam jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir di bulan berjalan. Untuk menghindari biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran, disarankan untuk menggunakan prosedur debit langsung. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu yang seragam untuk penyerahan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu 26.06.2023/25.07.2023, pukul 0:00 dalam setiap kasus). Keunikan regional mengenai tanggal jatuh tempo harus diperhatikan, jika berlaku. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh agen eksternal, data upah dan gaji harus dikirim ke agen sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku khususnya jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.